



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG**

**LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, laporan Layanan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini memuat gambaran kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik
3. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
4. Rincian Layanan Informasi Publik
5. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
8. Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Pelaksanaan layanan informasi publik ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan berpedoman pada nomenklatur terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan layanan informasi publik, sebagai bahan evaluasi, serta sebagai dokumen resmi yang disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi menetapkan kebijakan layanan informasi publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan ini diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan layanan informasi publik diarahkan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di Provinsi Jambi, dengan tetap memperhatikan klasifikasi informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi telah menyediakan sarana dan prasarana berupa meja layanan informasi, perangkat komputer, jaringan internet, papan informasi, serta media layanan informasi melalui website resmi dan media komunikasi elektronik lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan layak digunakan.

3.2 Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan layanan informasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang tergabung dalam struktur PPID, terdiri dari PPID Pelaksana, petugas layanan informasi, dan pejabat struktural terkait. SDM yang menangani layanan informasi publik telah memahami tugas dan fungsi pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran layanan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi menerima sejumlah permintaan informasi publik dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

No	Nama	Nomor Surat	Tanggal	Perihal	Disposisi	Keterangan
1	UNJA Fakultas Hukum	63/UN21.4/PT.01.04/2025	6 Januari 2025	Pengantar Izin Penelitian dan Permintaan Data Skripsi	Bidang Cipta Karya	
2	Tempo Bersatu	007/TB-JMB/KFR/1/2025	13 Januari 2026	Konfirmasi Mohon Penjelasan Serta Mendapatkan Dokumen Lelang Amdal dan RAB	Bidang Bina Program dan Tata Ruang	
3	SETDA	100.1.2/038/SETDA.PEM.OTDA/1/2025	9 Januari 2025	Permintaan Data LKPJ Tahun 2024	Bidang Bina Program dan Tata Ruang	
4	Media Lintas Sumatera	01/MELTRA/rumahsubsidi/JAN/2025	15 Januari 2025	Permohonan Informasi Realisasi Pembangunan	Bidang Perumahan	

				Perumahan Subsidi		
5	BPKP	PE.11.02/SE.17/PW05/3/2025	13 Januari 2025	Permintaan Data Dalam Rangka Pengumpulan Informasi Awal Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD	Bidang Bina Program dan Tata Ruang	
6	ITB	1163/ITI.CO6.4.10/KM.00/2024	8 Januari 2025	Permohonan Data Penelitian	Bidang Sekretariat	
7	Channel Berita 24	04/CB24/BKJ-MJ/1/2025	21 Januari 2025	Mohon Penjelasan dan Mendapatkan RAB dan Dokumen Lelang Islamic Center	Bidang Cipta Karya	
8	UNBARI	37/UBR-02/D/1/2025	20 Januari 2025	Permohonan Permintaan Data Untuk Menyusun Proposal Skripsi	Bidang Sekretariat	
9	PT. KEDATON MULIA PRIMAS	008/KWP-BH/1/2025	24 Januari 2025	Permohonan Informasi Kesesuaian Tata Ruang	Bidang Bina Program dan Tata Ruang	
10	BKD	S.376/BKD-4.2/2025	24 Januari 2025	Permintaan Data Pejabat Fungsional Yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Bidang Sekretariat	
11	UNJA	732/UN/21.5/PK.01.06/2025	24 Januari 2025	Permohonan Surat Penelitian	Bidang Sekretariat	

12.	UNBARI	64/UBR-04/N/2025	20 Februari 2025	Permintaan Data Untuk Laporan Kerja Praktek	Bidang Bina Marga	
13	PT. MITRA HIJAU INDONESIA	57/MH/PELINDUJAMBI/I /2025/KM	25 Febuari 2025	Surat Permohonan Data	Bidang Bina Program dan Tata Ruang	
14	UNJA	258/SP/CEF/HMTK/III/20 25/B	05 Maret 2025	Kejelasan Renovasi Gedung GOR	Bidang Cipta Karya	
15	UNIVERSITAS PADJAJARAN	3644/UNG.6/PR.01.04/2 025	04 Maret 2025	PERMOHONAN IZIN RISET / WAWANCARA a.n Dian Primasella, NPM	Bidang Sekretariat	
16.	DIREKTOR JENDRAL PAJAK	S-147/KPP.2710/2025	10 Maret 2025	Permintaan Data Harga Pasar Material dan Upah Bangunan Tahun 2013 dan 2024	Bidang Cipta Karya	
17.	DINAS PERHUBUNGAN	PEG.00/280/DISHUB /2025	15 April 2025	Permintaan Data	Bidang Bina Marga	
18.	UNBARI	121/UBR.04/N/2025	03 Mei 2025	Permohonan Izin Pengambilan Data Untuk Tugas Akhir	Bidang Bina Marga	
19.	UNAMA	053/SP/KPS- NIN/UNAMA/V/2025	17 Mei 2025	Perihal Permintaan Data	Bidang Sekretariat	
20.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	PA 0101-AH/274	26 Mei 2025	Permohonan Permintaan Data Indeks Ketahana Air WS-MSBI	Bidang Sumber Daya Air	

21.	KEMENTERIAN KEHUTANAN	S.40/BPDAS.BH/PEYDAS/DAS.01.01/B/06/2025	23 Juni 2025	Permohonan Data	Bidang Sumber Daya Air	
22.	DPUPR TANJAB BARAT	600.1.15.1/46/DPUPR/2025	05 Juli 2025	Permohonan Data Penyusunan Kebijakan dan Kegiatan Penyelenggaraan SPAM	Bidang Sumber Daya Air	
23.	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI	B/2785/1X/2025/RESKRI M	10 September 2025	Permintaan dokumen	Bidang Bina Marga	
24.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Direktorat jendral Pemeriksaan Keuangan Negara VII	04/TIM-KINERJA HK/10/2025	8 Oktober 2025	Permohonan Permintaan Data dan Pendampingan Kunjungan	Bidang Bina Marga	
25.	PT. SILIKA SELARAS CAHAYA INDONESIA	001/SP/X/2025	10 Oktober 2025	Permohonan Informasi Kesesuain Ruang	Bidang Bina Program dan Tata Ruang	
26.	REDAKSI ELANG NUSANTARA PROVINSI JAMBI	12/PEN-PROVINSIJAMBI/XII/2025	22 Desember 2025	Permintaan Salinan SP, Dokumen Denda dan Penerbitan Rekomendasi Pembongkaran Paksa Pagar Gudhas Village	Bidang Cipta Karya	

4.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi

Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik telah sesuai dengan standar layanan informasi publik, yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.

4.3 Permintaan Informasi yang Dikabulkan

Sebagian besar permintaan informasi publik dapat dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian, sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan informasi.

4.4 Permintaan Informasi yang Ditolak

Permintaan informasi publik yang ditolak merupakan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan atau tidak berada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi menerima keberatan maupun sengketa informasi publik yang berlanjut ke Komisi Informasi. Apabila terdapat keberatan, seluruhnya telah ditangani sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat terkait prosedur permohonan informasi serta keterbatasan sumber daya pendukung. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui koordinasi internal dan peningkatan kualitas pelayanan.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM PPID, optimalisasi pemanfaatan media digital, serta penyempurnaan sarana dan prasarana layanan informasi publik.

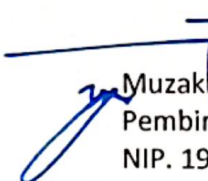
BAB VIII

PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi, serta sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Jambi, 31 Maret 2026

Kepala Dinas,


Muzakir, M.Si, M.M.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19730302 200604 1 003

